



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN  
DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI MASYARAKAT DESA  
SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU  
KABUPATEN KAMPAR)”**

**SKRIPSI**

Dajukan sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)



**OLEH:**

**ANWAR FAUZAN AFIF**

**NIM: 11721102889**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1442 H / 2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI MASYARAKAT DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR)**” yang ditulis oleh :

NAMA : ANWAR FAUZAN AFIF

NIM : 11721102889

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2021

Pembimbing Skripsi,

**Dr. H. Maghfirah, M.A**  
**NIP. 1971010 81 99703 1 003**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI MASYARAKAT DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR) ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ANWAR FAUZAN AFIF**  
NIM : 11721102889  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ujian Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Heri Sunandar, M. CL**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, SL, MA**

Penguji I  
**Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag**

Penguji II  
**Dr. Zulikromi, LC, M. Sy**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulfitri, M. Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005



## ABSTRAK

**Judul Skripsi ini adalah : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA: Studi Masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”.**

Penelitian yang berbentuk skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek perceraian yang dilaksanakan di luar Pengadilan Agama di masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Praktek tersebut tentu berbeda dengan ketentuan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Sukaramai yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama, sedangkan objek penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pasutri Perceraian diluar Pengadilan Agama, dan masyarakat yang ada di Desa Sukaramai. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: *Pertama*, Dalam lingkup hukum Islam asal (*fiqih*), status perceraian yang dilakukan masyarakat Desa Sukaramai di luar Pengadilan Agama tidak ada pertentangan dengan hukum tersebut sehingga tetap dianggap sah. *Kedua*, Perceraian di luar Pengadilan Agama oleh Masyarakat Desa Sukaramai batal karena hukum, sebab memiliki mudharat yang lebih besar dari pada manfaat.

**Kata Kunci : Peceraian diluar Pengadilan Agama, Sukaramai, Tinjauan Hukum Islam**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA: Studi Masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk almarhum ayahanda **Zainal Abidin Sipayung** dan ibunda **Rita Cabina**, serta untuk saudara-saudara kandung saya Herfika yunita elza, Syafitra alhafi, Fauzi ahlam, dan Cindy aulia. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan jajarannya.
3. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag, Sekretaris Jurusan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
5. Bapak Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
6. Bapak Kepala Desa, Alim Ulama serta seluruh lapisan masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang telah bersedia memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
7. Spesial untuk rekan-rekan yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, kawan seperjuangan Hukum Keluarga, terutama untuk Syahbiq, Ali, yang ikut serta dalam membantu pembuatan Skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin..*

Sukaramai, 8 Juni 2021  
Penulis

**ANWAR FAUZAN AFIF**  
**NIM: 1172 1102 889**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II            GAMBARAN UMUM DESA SUKARAMAI</b>	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu .....	17
B. Keadaan Wilayah .....	18
C. Kepala Desa .....	25
D. Pemerintahan Desa.....	25
E. Sekretaris Desa.....	25
F. Kepala Urusan Pemerintah .....	26
G. Kepala Urusan Umum.....	27
H. Kepala Urusan Pembangunan .....	28
I. Kepala Urusan Keuangan .....	28





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

A. Pengertian Perceraian.....	29
B. Dasar Hukum Perceraian .....	31
C. Syarat dan Rukun Talak.....	34
D. Rukun Talak.....	35
E. Macam-macam Perceraian dan Hukum Menjatuhkannya ....	35

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA DI DESA SUKARAMAI**

A. Alasan Masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama .....	63
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perceraian diluar Pengadilan Agama di Desa Sukaramai .....	67

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I. 1	Tingkat Perceraian Desa Sukaramai .....	7
Tabel I. 2	Jumlah Populasi dan Sampel .....	11
Tabel II. 1	Luas Desa Sukaramai .....	18
Tabel II. 2	Batas Desa .....	19
Tabel II. 3	Panjang Keseluruhan Jalan Desa .....	19
Tabel II. 4	Kondisi Ekonomi Masyarakat .....	20
Tabel II. 5	Jumlah Mata Pencaharian Berdasarkan Profesi .....	21
Tabel II. 6	Jumlah Produk Domestik Desa .....	21
Tabel II. 7	Jumlah Sarana Pendidikan .....	22
Tabel II. 8	Jumlah Keagamaan .....	22
Tabel II. 9	Jumlah Sarana Umum .....	23
Tabel II.10	Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan .....	23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa.<sup>1</sup>

Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma dan moral yang benar, harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala macam rintangan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.

Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah jalan mereka goyah, mereka gagal mencapai tujuan yang dicita-citakan sebelumnya, mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi.

Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendur, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), cet. ke 1 h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumahtangga bukan lagi seperti istana dan surga tapi berubah bagaikan penjara dan neraka.<sup>2</sup>

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua bela pihak.<sup>3</sup>

Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian tapi itu bukan berarti bahwa islam membuka jalan yang selebar- lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga berarti bahwa islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja, tapi islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempu oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.<sup>4</sup>

Secara tidak langsung Islam, membolehkan perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung:PT Cipta Aditya Bakti 1990), cet. ke-1 h. 169.

<sup>3</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), cet. ke-1 h. 1.

<sup>4</sup> Somiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 1986), cet. ke-1 h. 104.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami istri. Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan keduanya, perihal anjuran penunjukan hakim yang akan mendamaikan perselisihan antara suami istri. Allah berfirman dalam QS an-Nisa : 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami- isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>5</sup>

Talak atau perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci Allah.

Oleh karena itu, bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungan.<sup>6</sup>

Dalam konteks ke Indonesiaan perceraian sendiri diatur oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No 9 Tahun 1975 sebagaimana tercantum dalam pasal 19, dan dalam KHI pasal 116. bagi kedua pasangan suami istri yang hendak bercerai terlebih dahulu

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra), h. 123.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-1, h. 101

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengajukan ke Pengadilan Agama. Bagi suami harus mengajukan permohonan izin talak, sedangkan bagi istri harus terlebih dahulu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Salah satu yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah menangani tentang masalah perceraian. Yang mana perceraian ini harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, atau dengan kata lain bahwa perceraian tidaklah Sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, apabila dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, Sesuai dengan Undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam hal ini hakim yang berhak.

Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Pasal 39 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan.<sup>7</sup>

Ayat 1 : perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademi Persindo CV, 1996), cet. ke-1 h. 91.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 115 Kompilasi hukum Islam menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut”.<sup>8</sup>

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih mempertahankan hukum adat dan tunduk pada hukum agama, serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul di tengah-tengah Masyarakat adalah masih banyak kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama, dan tidak mendapatkan akta perceraian yang sah dari Pengadilan Agama. Terutama yang terjadi di Masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Banyak dari masyarakat tersebut yang melakukan perceraian, bahkan tanpa adanya ucapan kata-kata cerai antara suami dan istri. Dan itu sudah dianggap sah menurut adat mereka.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar mayoritasnya beragama Islam, memiliki sifat dan kekeluargaan yang cukup tinggi jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Latar belakang pendidikan mayoritas masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maka tidak heran apabila masyarakat masih banyak yang tidak sadar masalah hukum, dan salah satunya adalah masalah perceraian sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama.

Menurut survey lapangan yang dilakukan oleh Penulis maka terdapatlah beberapa alasan mengapa masyarakat tersebut banyak yang melakukan perceraian di luar Persidangan Pengadilan Agama. Menurut Ahmad Yazid salah seorang tokoh agama sekaligus Penghulu Nikah di Desa Sukaramai mengatakan bahwa banyak masyarakat yang hanya melakukan perceraian dirumah dengan cara seorang laki- laki mengatakan kepada istrinya aku pulangkan engkau kepada orang tuamu, aku ceraikan engkau atau kamu boleh menikah dengan laki-laki lain dan begitupun sebaliknya aku boleh menikah dengan perempuan lain dan pada saat itu jatulah talak atau cerai. Oleh karena itu masyarakat Desa Sukaramai berani menikah lagi meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut Hukum Negara.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan Masyarakat Desa Sukaramai melakukan itu disamping memang mayoritas Pendidikannya hanya Sekolah Dasar dan sampai Sekolah Menengah Pertama adalah, yang pertama dikarenakan urusannya ribet dan banyak berkas-berkas yang mau diurus<sup>9</sup>. Yang kedua tidak adanya biaya atau tempat Pengadilan Agama yang jauh<sup>10</sup>. Yang ketiga kalau sudah sah menurut agama kenapa harus mengikuti proses Persidangan Pengadilan Agama lagi?<sup>11</sup>. yang keempat kurang mengerti atau tidak mau berurusan Pengadilan Agama dikarenakan malu dilihat orang<sup>12</sup>. Itulah beberapa alasan Masyarakat Desa Sukaramai melakukan Perceraian di luar Persidangan Pengadilan Agama.

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Perceraian Desa Sukaramai**

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1.	2016	4 Pasangan
2.	2017	5 Pasangan
3.	2018	8 Pasangan
4.	2019	9 Pasangan
5.	2020	9 Pasangan
<b>Jumlah</b>		<b>35 Pasangan</b>

*Sumber: Kantor Urusan Agama Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

Jadi dari tabel persentase tingkat perceraian di atas , maka dapat disimpulkan bahwa tingkat perceraian pada tahun 2016 sebanyak 4 pasangan, tahun 2017 sebanyak 5 pasangan, tahun 2018 sebanyak 8 pasangan, tahun 2019 sebanyak 9 pasangan, dan tahun 2020 sebanyak 9

<sup>9</sup> Muhammad Amiruddin, *wawancara*, sukaramai, 25 Februari 2021

<sup>10</sup> Yetno, *wawancara* ,sukaramai, 27 Februari 2021

<sup>11</sup> SiHombing, *wawancara*, sukaramai, 1 Maret 2021

<sup>12</sup> Irum ahmad, *wawancara*, sukaramai, 25 Maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pasangan. Maka dari persentase tingkat perceraian yang tinggi di Desa Sukaramai pada 5 tahun belakangan, penyusun berniat untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: *“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI MASYARAKAT DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR)”*

## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam peneliti ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan “Terhadap alasan perceraian di luar Pengadilan Agama (Studi Masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)”

## C. Rumusan Masalah

1. Apa alasan masyarakat di Desa Sukaramai melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar?

## D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan alasan masyarakat di Desa Sukaramai melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk syarat menyelesaikan S.1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Studi ini diharapkan berguna bagi perkembangan khasanah keilmuan, khususnya dalam masalah perceraian di luar Pengadilan Agama.
- c. Memberikan tambahan wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya tentang perceraian di luar Pengadilan Agama.

### E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.<sup>13</sup>

Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal, dalam penelitian ini.

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data dari tokoh masyarakat , pelaku pelaksanaan alasan perceraian di luar Pengadilan Agama lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan alasan perceraian di luar Pengadilan Agama.

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), cet. ke-21, h. 6

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini disebabkan penulis bertempat tinggal disana.

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian terhadap Pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama di Masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama dan Masyarakat sekitar.
- b. Objek penelitian adalah apa yang akan di teliti dalam penelitian ini. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah “Terhadap alasan perceraian di luar Pengadilan Agama (Studi Masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)”

## **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Masyarakat di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 215.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar yang terdiri dari, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang berjumlah 29 orang.

- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>15</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu sebanyak 9 orang,<sup>16</sup> yang terdiri dari 2 orang tokoh agama, 2 orang tokoh masyarakat 5 orang pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama.

**Tabel 1. II**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Populasi	Jumlah	Sampel
1.	Tokoh Agama	5	2
2.	Tokoh Masyarakat	4	2
3.	Cerai di luar Pengadilan Agama	20	5
<b>Jumlah</b>		29	9

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Tokoh Agama di Desa Sukaramai berjumlah 5 orang, sedangkan jumlah Tokoh Masyarakat berjumlah 4 orang dan jumlah pasangan yang

<sup>15</sup>Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23.

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), cet. ke-1 h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan cerai di luar Pengadilan Agama berjumlah 20 pasangan. Dari keseluruhan populasi tersebut, maka penulis mengambil 9 sampel.

## 5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obeservasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>17</sup>

Sumber data primer adalah orang-orang yang melaksanakan dan terlibat dalam pelaksanaan eceraian di luar Pengadilan Agama di Masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

### b. Data Sekunder

Sumber data yang tidak langsung diberikan data pada pengumpul data. Yaitu lewat dokumen, letak geografis, sejarah, kondisi masyarakat desa, serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>17</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), cet. ke-4, h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Data Tersier

Sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yang dalam hal ini data tersier yang penulis gunakan adalah Ensiklopedi hukum Islam, Kamus ilmiah, Kamus Bahasa Arab-Indonesia serta kamus Hukum.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Obsevasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta oleh panca indera lainnya.<sup>18</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2007), h. 115.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>19</sup>

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama di Masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang dokumentasi.<sup>20</sup>

### 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh adat yang tersedia dari berbagai sumber dari observasi, wawancara dan angket. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

<sup>19</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2015), cet. ke-5 h. 138.

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, *op. cit.*, h. 141





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 8. Teknik Penulisan Data

Setelah data-data diolah dan ditinjau, kemudian disusun dengan metode-metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.
- b. Deskriptif, yaitu metode dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam skripsi ini, penulis bagi menjadi lima bab, tiap bab terdiri dari sub-sub bab, satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I** merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih berfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metodologi penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Kondisi Geografis, dan Demografis, Sosiologis Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

**BAB III** berisi penjelasan yang membahas Tinjauan Umum Tentang Perceraian, yang meliputi: pengertian perceraian dan dasar hukumnya, macam-macam perceraian dan hukum menjatuh-kannya, pemeriksaan sengketa perceraian, dan alasan yang membolehkan perceraian menurut undang-undang dan akibat perceraian.

**BAB IV** penjabaran tentang hasil penelitian, bab ini penulis membahas tentang konsep pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama di Masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan tinjauan hukum Islam bagi pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama di masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

**BAB V** adalah penutup, dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DESA SUKARAMAI

#### A. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu

Desa Sukaramai adalah sebuah desa defenitif hasil dari pemekaran Desa induk yaitu Desa sinama nenek pada tahun 2002, Desa Sukaramai terletak sebelah Barat Kota Kabupaten Kampar berada dalam wilayah Kecamatan Tapung Hulu yang berbatasan dengan Kabpaten Rokan Hulu. Luas wilayah Desa Sukaramai 6750 Ha dengan jumlah Penduduk 7608 jiwa, 3916 laki-laki dan 3692 perempuan dibagi menjadi 52 RT, 14 RW dan 4 Dusun dengan mayoritas mata pencaharian Masyarakat petani dan pedagang.<sup>21</sup>

Pada awal pemekaran tahun 2002 Kepala Desa Sukaramai dijabat oleh PJ pertama yaitu Bapak Ahmad Wahi dengan Sekretaris Bapak Tardi dan beliau menjabat kurang lebih dua tahun sampai dengan 2004, dikarenakan beliau meninggal dunia maka pada tahun 2004 PJ Kepala Desa dijabat oleh Bapak Tardi sampai dengan tahun 2005. Dan pada tahun 2005 terjadi peralihan PJ Kepala Desa yang dijabat oleh Bapak Sabaruddin dan M. Arif sebgai Sekdes (2005-2007). Dan pada tahun 2007 diadakanlah pemilihan Kepala Desa secara langsung untuk pertama kalinya di Desa Sukaramai.

<sup>21</sup> Tardi, mantan kepala desa Sukaramai, wawancara pada tanggal 14 April 2021. Pukul 16.35

## B. Keadaan Wilayah

### 1. Kondisi Geografis

Desa Sukaramai masuk dalam wilayah Kecamatan Tapung Hulu dengan luas Wilayah 6750 Ha, dimana 90% berupa daratan yang berfotografi dataran, dan 60% dataran dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan. Iklim di Desa Sukaramai sebagaimana desa-desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Sukaramai kecamatan Tapung Hulu. Jarak Desa Sukaramai dengan ibukota Kabupaten 52 km dengan waktu tempuh 60 menit, jarak dengan Ibukota Provinsi 74 km dengan waktu tempuh 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan umum dan dengan kemudahan sarana transportasi umum yang dapat ditemui setiap hari.

### 2. Kondisi Demografis<sup>22</sup>

**Tabel II. 1**  
**Luas Desa Sukaramai**

No	Luas Desa	Luas Lahan
1.	Pemukiman	70 ha
2.	Ladang tegalan	161 ha
3.	Perkebunan	5222 ha
4.	Perkantoran	1 ha
5.	Sekolah	4 ha
6.	Jalan	80 ha
7.	Lapangan Sepakbola	1 ha

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

<sup>22</sup> Propil Desa Sukaramai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Luas Pemukiman Desa Sukaramai adalah 70 ha, Ladang tegalan seluas 161 ha, Perkebunan seluas 5222 ha, Perkantoran seluas 1 ha, Sekolah seluas 4 ha, Jalan seluas 80 ha, dan Lapangan Sepakbola seluas 1 ha.

**Tabel II. 2**

**Batas Desa**

No	Batas	Berbatasan
1.	Utara	Degan Desa Sei Kijang
2.	Selatan	Dengan Desa Kusau Makmur
3.	Barat	Desa Sumber Sari
4.	Timur	Desa Petapahan

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat dilihat Desa Sukaramai sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Sei Kijang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kusau Makmur, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Sari, sedangkan sebelah Timur berbatasan langsung dengan Desa Petapahan.

**Tabel II. 3**

**Panjang Keseluruhan Jalan Desa**

No	Jalan	Panjang Jalan
1.	Jarak ke ibukota Kecamatan	20 km
2.	Jarak ibukota Kabupaten	52 km
3.	Jarak ibukota Provinsi	74 km

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Jarak Desa Sukaramai dengan Ibukota Kecamatan adalah 20 km, sedangkan jarak dengan Ibukota Kabupaten 52 km, dan Jarak dengan Ibukota Provinsi 75 km.

**Tabel II. 4**  
**Kondisi Ekonomi Masyarakat**

No	Keseluruhan	Jumlah
1.	Jumlah angkatan kerja	300 orang
2.	Jumlah Usia Sekolah	500 orang
3.	Jumlah Ibu Rumah Tangga	400 orang
4.	Jumlah Pekerja Penuh	250 orang
5.	Jumlah Rumah Tangga Berkebun	150 orang
6.	Jumlah Rumah Tangga Tani	50 orang

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah angkatan kerja di Desa Sukaramai berjumlah 300 orang, sedangkan jumlah usia yang bersekolah 500 orang, jumlah ibu rumah tangga sekitar 400 orang, jumlah pekerja penuh sekitar 250 orang, jumlah rumah tangga yang berkebun adalah 150 orang, dan jumlah rumah tangga yang bertani berjumlah 50 orang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II. 5**  
**Jumlah Mata Pencaharian Berdasarkan Profesi**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	349 orang
2.	Pedagang	312 orang
3.	PNS	15 orang
4.	Tukang	45 orang
5.	Guru	89 orang
6.	Bidan / Perawat	10 orang
7.	TNI / Polri	4 orang
8.	Pensiunan	12 orang
9.	Swasta	32 orang

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah mata pencaharian Masyarakat Desa Sukaramai berdasarkan Profesinya dimulai dari yang berprofesi sebagai Petani berjumlah 349 orang, sebagai Pedagang berjumlah 312 orang, yang berprofesi sebagai PNS berjumlah 15 orang, sedangkan yang menjadi tukang berjumlah 45 orang, sebagai Guru berjumlah 89 orang, Bidan / Perawat berjumlah 10 orang, TNI / Polri berjumlah 4 orang, Pensiunan berjumlah 12 orang, dan Pegawai swasta berjumlah 32 orang.

**Tabel II. 6**  
**Jumlah Produk Domestik Desa**

No	Produk	Luas & Jumlah
1.	Padi Ladang	-
2.	Jagung	0,5 ha
3.	Palawijaya	1 ha
4.	Cabe	1 ha
5.	Karet	222 ha
6.	Kelapa Sawit	5000 ha
7.	Singkong	1 ha

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah produk domestik Desa Sukaramai beserta luasnya dapat dirincikan Sebagai berikut: Padi ladang = tidak ada, Luas ladang Jagung seluas 0,5 ha, luas ladang Palawijaya seluas 1 ha, sedangkan luas kebun Cabe seluas 1 ha, luas kebun Karet seluas 222 ha, Luas kebun kelapa Sawit seluas 5000 ha, dan luas kebun singkong seluas 1 ha.

**Tabel II. 7**  
**Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1.	TK / PAUD	3 unit
2.	SD / MI	2 unit
3.	SLTP / MTS	1 unit
4.	SLTA / SMA	1 unit

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah sarana Pendidikan di Desa Sukaramai adalah sebagai berikut : Jumlah sarana TK / PAUD berjumlah 3 unit, SD / MI berjumlah 2 unit, SLTP / MTS berjumlah 1 unit, dan sarana SLTA / SMA berjumlah 1 unit.

**Tabel II. 8**  
**Jumlah Keagamaan**

No	Agama yang dianut	Jumlah
1.	Islam	5933 orang
2.	Katolik	139 orang
3.	Kristen	1518 orang
4.	Hindu	-
5.	Budha	7 orang

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah keagamaan di Desa Sukaramai atau masyarakatnya mayoritas beragama Islam dengan persentase 80% berbandingan 15 % dengan masyarakat yang menganut agama kristen, dan selebihnya berjumlah 5 % untuk agama yang lainnya.

**Tabel II. 9**  
**Jumlah Sarana Umum**

No	Sarana Umum	Jumlah
1.	Masjid	7 buah
2.	Gereja	3 buah
3.	Pura	-
4.	Vihara	-
5.	Mushollah	8 buah

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah sarana Umum di Desa Sukaramai adalah sebagai berikut : Jumlah masjidnya adalah 7 buah, sedangkan jumlah Gereja berjumlah 3 buah dan jumlah Mushollah berjumlah 8 buah.

**Tabel II. 10**  
**Jumlah Sarana Olahraga dan Kepemudaan**

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1.	Lapangan Sepak Bola	2 buah
2.	Lapangan Volly	1 buah
3.	Lapangan Takraw	-
4.	Lapangan Badminton	2 buah

*Sumber: Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah sarana olahraga di Desa Sukaramai adalah sebagai berikut : jumlah Lapangan Sepak Bola 2 buah , jumlah Lapangan Volley 1 buah, dan jumlah lapangan badminton 2 buah.

### 3. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sukaramai secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, pedagang, perkebunan karet dan sawit, sebagian kecil disektor formal seperti PNS Pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, TNI/POLRI, dll.<sup>23</sup>

### 4. Agama

Agama di Desa Sukaramai 90 % memeluk Agama Islam yang merupakan agama islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya, dan selebihnya merupakan agama kristen. Akan tetapi di Desa Sukaramai sendiri sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai bertoleransi antar Agama sehingga tidak adanya Deskriminasi antar umat beragama didesa tersebut.

<sup>23</sup> Tardi, wawancara , Sukaramai 18 April 2021

### C. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan peneyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 5 Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari dusun-dusun dalam desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.<sup>24</sup>

### D. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar hanya mempunyai 1 ( Satu Dusun) yaitu dusun Srikandi yang dijabat oleh Pak Hombing.<sup>25</sup>

### E. Sekretaris Desa

Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Perencanaan dan Program Kerja Desa, Keuangan, Administrasi, umum serta Kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Propil Desa Kantor Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabapaten Kampar.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sekretaris Desa mempunyai tugas meliputi :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

#### F. Kepala Urusan Pemerintah

Tugas Kepala Urusan Pemerintah meliputi<sup>27</sup> :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).

---

<sup>27</sup> Ibid

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

### G. Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi:<sup>28</sup>

1. Melaksanakan menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
5. Menyenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat kekayaan inventarisasi desa.

---

<sup>28</sup> Rosalina, Sekretaris dikantor Desa Sukaramai, *wawancara*, Sukaramai 25 April 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## H. Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa.
3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

## I. Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi :

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan
2. perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
4. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa
5. Melakukan administrasi keuangan desa.
6. Merencanakan penyusunan APBDDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

## A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa arab adalah الطلاق yang bermakna cerai nikah, bercerai.<sup>29</sup>

Talak menurut *istilah* dapat diketahui dari beberapa pengertian dibawah ini:

فى الا صطلاح بأنه ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya : “Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata- kata tertentu”.<sup>30</sup>

وفى الشرع حلّ رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية

Artinya: “Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri”.<sup>31</sup>

Abdul Djamali dalam bukunya, *Hukum Islam*, mengatakan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.<sup>32</sup>

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud talaq adalah melepas adanya tali

<sup>29</sup>H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1990), hlm. 239

<sup>30</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 216.

<sup>31</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), hlm. 278

<sup>32</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, ( Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkawinan antara suami isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata *talak* atau semacamnya sehingga isteri tidak halal baginya setelah ditalak.

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian salah satu pihak
2. Putus akibat perceraian.
3. Atas Putusan Pengadilan.<sup>33</sup>

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan isteri masih hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak isteri dan terjadi di luar kehendak suami isteri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut *talak*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*.<sup>34</sup>

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 56.

<sup>34</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 73

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 73



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: *talak, khulu, fasakh, li'an dan ila'*.<sup>36</sup>

Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus Islam memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan isterinya dan hak khulu kepada isteri untuk menceraikan suaminya dan hak *fasakh* untuk kedua suami-isteri. Dengan demikian maka yang memutuskan perkawinan dan menyebabkan perceraian antara suami-isteri, ialah *talak, khulu, fasakh*.<sup>37</sup>

## B. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau *thalaq* dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadist. Hal ini dapat dilihat pada sumber-sumber dasar hukum berikut ini:

1. Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila kamu mentalaq istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) unuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan

<sup>36</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm.

2. <sup>37</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990), hlm.110.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>38</sup>

## 2. Hadist Nabi

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”<sup>39</sup>.

## 3. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ حَرَامٌ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ لَكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Al-Qur'an dan hadits telah mengatur masalah perceraian ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat kita lihat dengan diberikannya batasan kepada suami yang ingin menceraikan istrinya dan merujuknya kembali. Islam membolehkan suami merujuk istrinya sampai talak yang kedua, tetapi jika telah sampai pada talak yang ketiga maka suami tidak mempunyai hak lagi untuk merujuk istrinya itu, kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah dengan pria lain dan oleh suaminya yang kedua

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 56.

<sup>39</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), hlm.120.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah diceraikan kembali. Barulah setelah itu suami yang pertama dapat rujuk kembali kepada mantan istrinya tersebut.

Hal ini berbeda sekali dengan yang terjadi pada masa *jahiliyyah*, di mana laki-laki boleh saja mentalak istrinya beberapa kalipun dia kehendaki. Kemudian setiap kali akan habis masa iddahnya, maka dirujukinya kembali sehingga hal ini terjadi berulang-ulang kali.<sup>40</sup>

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang

<sup>40</sup> Bakri A, Rahman dan A. Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/B.W.* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1981), cet. ke-1 h. 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

### C. Syarat dan Rukun Talak

#### 1. Syarat talak<sup>41</sup>

##### 1. Ikatan Suami Istri

Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi ikatan suami istri maka tidak sah talaknya. Yang tidak menyebabkan terjatuhnya talak ada empat: anak kecil, orang gila, orang yang tidur dan orang yang mabuk.

##### 2. *Baligh*

Seorang yang menjatuhkan talak harus *mumayyiz*, anak kecil tidaklah dapat menjatuhkan talak. *Baligh* merupakan istilah dalam Hukum Islam yang menunjukan seseorang telah mencapai kedewasaan. *Baligh* diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti, sampai, maksudnya, telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan.

<sup>41</sup> Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hushni ad-Dimasyqi as-Syafi'I, *Kifayatul akhyar fi jalli ghoyatil ikhtishor Juz II*, tt, (Semarang:Toha Putera), h. 102.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Berakal Sehat

Yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya terus menerus ataupun hanya sewaktu-waktu diakibatkan oleh penyakit.

### D. Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbagi tiga, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Suami, selain suaminya isteri yang ditalak tidak dapat mentalak.
- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek mendapatkan talak.
- c. Sighat, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sendirian dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.

### E. Macam-macam Perceraian dan Hukum menjatuhkannya

#### (1) Macam-macam Perceraian

Menurut perspektif hukum Islam di Indonesia cerai atau talak itu terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari sudut pandang apa kita melihatnya.

Ditinjau dari boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya terbagi menjadi dua macam yaitu:

<sup>42</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992), cet. ke-1 h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. *Talaq Raj'i*

*Talaq raj'i* menurut etimologi adalah di mana suami dapat rujuk kembali, sedangkan menurut istilah fiqih adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah betul-betul dikumpulinya, talak yang bukan sebagai ganti mahar yang dikembalikan serta talak itu baru dijatuhkannya sekali.<sup>43</sup>

Menurut H. A Fuad Said dalam bukunya *Perceraian Menurut Hukum Islam* yang dimaksud dengan *talaq raj'i* yaitu talak suami kepada istri yang telah dicampuri, baik dengan *sharih* (terang) maupun *kinayah* (sindiran).<sup>44</sup> Ditambahkan pula oleh A. Zuhdi Muhdhor bahwa talak satu atau talak dua tersebut tanpa ada penebus talak dari istri untuk suami serta rujuknya suami tidak perlu adanya akad baru.<sup>45</sup>

Tidak ada perbedaan dengan pengertian yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 118 bahwa yang dimaksud dengan *talaq raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al- Kitab al-Arabi, 1973), cet. ke-2, jilid 2, h. 58

<sup>44</sup> H. A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1998), cet. ke-30, h. 55

<sup>45</sup> A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1999), cet. ke-2, h. 94

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *op.cit.*, h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. *Talaq Ba'in*

*Talaq ba'in* adalah talak untuk yang ketiga kalinya atau talak yang dijatuhkan sebelum istri dikumpuli dan talak yang jatuh dengan tebusan oleh istri kepada suaminya (khulu). Talak ba'in ini terbagi kedalam dua macam yaitu:

### 1) *Talaq ba'in sughra*

*Talaq ba'in shugra* yaitu talak yang kurang dari tiga kali yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Menurut A. Zuhdi Mudhor *talaq ba'in shugra* juga termasuk talak satu dan dua.<sup>47</sup> Adapun yang termasuk *talaq ba'in shugra* sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 yaitu:

- a) Talak yang terjadi *qabla al-dukhul* (sebelum berhubungan seksual)
- b) Talak dengan tebusan atau *khulu'*
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama<sup>48</sup>

Talak yang terjadi *qabla dukhul* ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang belum pernah dicampuri. Istri yang demikian boleh ditalak tetapi ia tidak mempunyai masa iddah, oleh karena itu suami dilarang rujuk kepadanya sebab rujuk itu hanya diperbolehkan pada masa iddah. Sebagaimana ketentuan Allah dalam surat al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

<sup>47</sup> A. Zuhdi Muhdor, *loc.cit.* h. 94

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *op.cit.*, h. 58

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai masa iddah, karena itu ia tidak bisa dirujuk oleh mantan suaminya kecuali dengan akad yang baru.

“Talak dengan tebusan atau dengan *khulu’* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami dan atas persetujuan suaminya. Penyebabnya karena suami cacat atau karena sebab yang lainnya, sedangkan tebusan tersebut bisa juga merupakan pengembalian mahar dari istri.”<sup>49</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *khulu’* ialah hak memutuskan akad nikah oleh istri terhadap suaminya yang terjadi atas kesepakatan (jumlah tebusan mahar) atau perintah hakim agar istri membayar dengan jumlah tertentu

<sup>49</sup> A. Zuhdi Muhdor, *op. cit.*, h. 95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak melebihi jumlah mahar suaminya.<sup>50</sup> Ketentuan mengenai hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang mana inti dari ayat tersebut menjelaskan bahwa *khulu'* adalah perceraian dengan tebusan berdasarkan kesepakatan suami istri tersebut atau dalam bahasa perundang-undangan disebut dengan gugat cerai dengan tebusan (*iwadh*).

“Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama” yaitu talak atau perceraian yang keputusannya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama di mana sebelumnya salah satu pihak (suami/istri) mengajukan permohonan/gugatan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk keperluan tersebut. Contohnya seperti perceraian yang terjadi karena suami melanggar ta’lik talak.<sup>51</sup>

Jadi ketiga jenis talak di atas semuanya termasuk kategori talak ba’in shugra dengan konsekuensi suami dilarang rujuk kembali kepada mantan istrinya, akan tetapi apabila suami tersebut masih menginginkan kembali kepada mantan istrinya, maka menurut Kompilasi Hukum Islam suami tersebut boleh menikahinya dengan syarat harus dengan akad nikah baru walaupun wanita tersebut belum habis masa iddah maksudnya

<sup>50</sup> A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, h. 251

<sup>51</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-1, h.123-126

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila mantan suami tersebut bermaksud hendak mengadakan akad nikah baru, maka tidak perlu menunggu sampai masa iddahnya selesai.

## 2) *Talaq Ba'in Kubra*

*Talaq ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat drujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa iddahnya.<sup>52</sup>

Menurut Sayuti Thalib yang termasuk talak *ba'in kubra* yaitu:

- a) Talak itu berupa talak tiga
- b) Perceraian karena *li'an* karena pasangan suami istri tersebut tidak diperbolehkan kawin lagi untuk selamanya.<sup>53</sup>

Talak yang ketiga kalinya itu adalah talak yang peristiwanya terjadi sebanyak tiga kali dan bukan talak yang dijatuhkan suami tiga kali sekaligus/berturut-turut, karena dalam Kompilasi Hukum Islam ada kata “terjadi” yang berarti ada kejadian/peristiwa talak yang mendahului talak ketiga tersebut yaitu talak satu dan talak dua.

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), *loc.cit.*

<sup>53</sup> Sayyuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. ke-5, h. 103-104

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sini dapat kita lihat bagaimana kehati-hatian Kompilasi Hukum Islam dalam menyusun redaksi tentang talak tiga, karena para ulama *fiqih* juga sepakat atas keharaman talak tiga yang diucapkan sekaligus. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam mengkategorikan talak tiga yang diucapkan sekaligus, apakah jatuh talaknya atau tidak.

Implikasi yang ditimbulkan dari *talaq ba'in kubra* ini adalah suami tidak dapat rujuk dan tidak dapat menikahi mantan istrinya lagi, kecuali apabila mantan istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan wanita tersebut telah habis masa iddahnya, maka suaminya yang pertama boleh menikahi mantan istrinya itu kembali.

Bila ditinjau dari sisi apakah talak itu sesuai dengan yang disyari'atkan oleh agama Islam atau tidak, maka talak itu terbagi menjadi dua macam yaitu:

**a) *Talaq Sunny***

*Talaq sunny* secara etimologi berarti talak sunnah atau talak yang diperbolehkan. Menurut Sayyid Sabiq *talaq sunny* adalah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang yang mentalak perempuan yang pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicampuri selama bersih itu.<sup>54</sup> Pengertian di atas sama dengan yang dimaksud oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 121 mengenai *talaq sunny*. *Talaq sunny* dijatuhkan sekali oleh suami atau istri yang suci dan belum dicampuri dalam waktu suci tersebut sebagaimana firman Allah surat *at-Thalaq* ayat 1 yang isinya adalah memerintahkan kepada para suami yang ingin menceraikan istri-istrinya hendaklah pada saat yang memungkinkan istri untuk beriddah yaitu setelah bersih atau suci dari haid atau nifas dan belum disetubuhi dalam waktu suci tersebut.

**b) *Talaq Bid'i***

*Talaq bid'i* adalah talak yang bertentangan dengan syar'i yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut atau seorang mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah - pisah dalam satu tempat.<sup>55</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefenisikan talak bid'i sebagaimana yang tercantum pada pasal 122: *talaq bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 42

<sup>55</sup> H.S. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Pekawinan Islam*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2002), cet. ke-2, h. 223



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri dalam keadaan suci tetapi suda dicampuri pada waktu suci tersebut.

## (2) Hukum Menjatuhkan Talak

Dalam Islam, talak tidaklah disukai dan sangat dibenci oleh Allah SWT karena dapat merusak hubungan baik dan kemaslahatan antara suami istri. Sesuai dengan hadits Nabi SAW:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق (رواه ابو داود والحاّم وصححه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.<sup>56</sup>

Adapun Mengenai hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemadharatannya, maka hukum talak ada 5 (lima), yaitu:<sup>57</sup>

- a) *Wajib*, yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim dari istri dan dari suami (QS. 4: 35). Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, pertengkaran, perselisihan, atau bahkan menjerumuskan keduanya

<sup>56</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996), h. 120

<sup>57</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. ke-1, h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib bagi keduanya.

- b) *Makruh*, yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat: pertama, bahwa talak tersebut haram dilakukan karena dapat menimbulkan madharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Talak seperti ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Kedua, menyatakan bahwa talak seperti itu dibolehkan.
- c) *Mubah*, yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan madharat dan menjatuhkan mereka dari tujuan pernikahan.
- d) *Sunnah*, yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala yang telah diwajibkan kepadanya, seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya, atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) *Mahzhur* (terlarang), yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid.

Para ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak seperti ini disebut juga dengan talak *bid'ah* karena menyalahi sunnah Rasulullah Saw dan mengabaikan perintah Allah SWT.<sup>58</sup>

Jumhur ulama termasuk *Malikiyyah*, *syafi'iyyah*, dan *Hanabilah* menyatakan bahwa talak termasuk hal yang diizinkan, tetapi lebih baik bila tidak melakukannya kecuali jika terpaksa, karena akan merusak hubungan kasih sayang. Karena itu, menurut mereka hukum talak dapat berubah menjadi haram, makruh, wajib, dan sunnah. Haram bila akibat talak itu akan mengakibatkan ia melakukan perbuatan zina atau jika talaknya *talaq bid'i. makruh* bila ia (suami) sebenarnya suka dengan pernikahan itu, atau ia sedang mengharapkan keturunan, atau ia tidak khawatir akan berbuat zina apabila bercerai. Wajib apabila suami sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah, atau karena sumpah *ila'* tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan. Sunnah bila istrinya adalah seorang yang ucapan-ucapannya kotor, sehingga ia khawatir akan melakukan perbuatan terlarang jika masih bersamanya.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 210

<sup>59</sup> Taufik Abdullah, et.al., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), cet. ke-2 h. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### (3) Tata Cara Perceraian Menurut Undang-undang

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang No. 01/1974 tentang perkawinan, yakni untuk mempersulit terjadinya perceraian (pasal 39), maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-undang No. 03/2006 Pasal 65, *jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 115).

Adapun tata cara atau prosedurnya dapat dibedakan menjadi dua macam:

#### 1. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan berdasarkan hukum Islam dalam memutuskan akad nikah antara suami istri. (1) Apabila suami hendak menceraikan istrinya, maka harus menempuh jalur hukum yaitu melalui gugat permohonan ke Pengadilan Agama (PA).

Menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 07/1989 sebagai berikut: “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.”

Adapun bunyi pasal 67 huruf A Undang-undang No. 07/1989 sebagai berikut:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu dan termohon yaitu istri.”

Jadi talak itu tidak bisa dilakukan secara sepihak, tetapi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan : suami sebagai pihak “pemohon”, dan istri sebagai pihak “termohon”.

Dalam rumusan pasal 14 PP No. 09/1975, dijelaskan pula beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan, yang berbunyi:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Selengkapnya, masalah tempat permohonan itu diajukan, diatur dalam pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang No. 07/1989 sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka pemohon diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Permohonan tentang pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.<sup>60</sup>

Dengan demikian, kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam mengadili gugat cerai talak diatur dalam pasal 66 tersebut agar gugatan tidak salah alamat, dan gugat cerai talak harus diajukan suami kepada Pengadilan Agama yang berpedoman kepada petunjuk yang telah ditentukan dalam pasal 66 di atas.

Dengan memperhatikan ketentuan yang digariskan dalam pasal tersebut, faktor utama menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak ini didasarkan pada “tempat kediaman termohon”, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri (Peraturan Menteri Agama RI No.03/1975).

<sup>60</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. ke-5, h.279

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, ayat (5) di atas memberikan peluang diajukannya kumulasi objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui Pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus menyelesaikan perkara semua tuntutan.<sup>61</sup>

Mengenai muatan dalam permohonan tersebut, selanjutnya pasal 67 Undang-undang No. 07/1989 ini menyatakan:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat:

- a) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon (suami), dan termohon (istri),
- b) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (sebagaimana yang dirinci dalam pasal 19 PP/No. 09/1975 *jo.* Pasal 116 (Kompilasi Hukum Islam).

Terhadap permohonan ini, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (pasal 130 Kompilasi Hukum Islam). Langkah selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan oleh pengadilan, yang diatur dalam pasal 68 UU No. 07/1989 yakni disebutkan:

<sup>61</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara PA*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 66

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepanitaraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Dalam rumusan pasal 15 PP No. 09/1975 dinyatakan:

“pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengiriman surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatunya yang berhubungan dengan maksud perceraian.” (Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak menutup kemungkinan untuk mendamaikan mereka. Karena persidangan semacam ini tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan. Mengenai hal ini, pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 03/1975 menjelaskan:

- 3) Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada (BP4) setempat agar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada suami –istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- 4) Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak, maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud.<sup>62</sup>

Langkah berikutnya diatur dalam pasal 70 Undang-undang No.07/1989, sebagaimana dirinci dalam pasal 16 PP No. 09/1975:

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, istri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, (Jakarta: Proyek Binpapera, 1981), h. 219

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dalam sidang itu, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadiri sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh (lihat pasal 131 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam)

Selanjutnya, itu diatur dalam pasal 17 PP No. 09/1975 sebagai berikut:

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirim kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isi pasal 17 PP No. 09/1975 tersebut kemudian dirinci lagi dalam pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Setelah sidang penyaksian ikrar talak, PA membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap talak yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami-istri, dan helai keempat disimpan oleh PA.”

Langkah terakhir dari pemeriksaan perkara cerai talak ini ialah penyelesaian perkara sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 71 Undang-undang No. 07/1989 tentang Peradilan Agama:

- 1) Panitra mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Cerai Gugat

Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-undang adalah “Cerai gugat”. Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat ini tidak banyak perbedaan dengan cerai talak.

Undang-undang No. 07/1989, tentang Peradilan Agama dan PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak membedakan antara khulu’ dengan “cerai gugat”, karena kedua-duanya merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan istri. Jadi dengan demikian, khulu’ termasuk kategori cerai gugat. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 09/1975 yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang No. 01/1974 tentang perkawinan dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan seperti dalam cerai talak, mengalami sedikit perubahan dalam Undang-undang No. 07/1989. tentang Peradilan Agama perubahan dimaksud terlihat pada:

Pertama, dalam pp No. 09/1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam Undang-undang No. 07/1989 dan Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya).

Kedua, pada prinsipnya pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian menurut PP No. 09/1975 diajukan di



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat, sedangkan menurut Undang-undang No. 07/1989 dan Kompilasi Hukum Islam ialah di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.<sup>63</sup>

Oleh sebab itu Undang-undang No. 07/1989 memberikan penjelasan dengan selengkap-lengkapnyanya mengenai tata cara cerai gugat dalam pasal- pasal yang berkenaan dengan hal tersebut. Pasal 73 misalnya, menyatakan:

- i. gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- ii. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- iii. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada PA Jakarta Pusat.

Asas pemeriksaan cerai gugat pada prinsipnya tunduk sepenuhnya kepada tata tertib yang diatur dalam Hukum Acara perdata, dalam hal ini HIR atau RBG. Namun demikian, khusus untuk perkara perceraian,

<sup>63</sup> Ahmad Rafiq, *op.cit*, h. 301

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang No. 07/1989 mengatur asas tersendiri. Di samping asas dan tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang No. 07/1989 ini, tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada asas-asas umum baik yang diatur dalam Undang-undang No. 14/1975, maupun asas-asas yang dicantumkan dalam UU No. 07/1989 ini. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara cerai gugat sama dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Karenanya, masalah ini tidak akan diuraikan lagi pada bagian ini.

Namun demikian, pada bagian ini akan dikemukakan secara ringkas apa-apa yang menjadi asas umum dimaksud yang terdiri dari:

#### 1. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim

Mengenai hal ini, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 07/191989 yang menjelaskan:

“pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepanitraan”

#### 2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup

Meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pasal 81 Undang-undang No. 07/1989 *jo.* Pasal 146 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 81 ayat (2) dan pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pasal 34 PP No. 09/1975).

3. Pemeriksaan di sidang pengadilan dihadiri suami istri atau wakil yang mendapat kuasa khusus dari mereka.

Hal ini menjadi faktor penting bagi lancarnya pemeriksaan perkara di persidangan. Karena itu pasal 142 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

- 1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
  - 2) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.
4. Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 82 ayat (4). Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan, dan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkait. Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitra Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan.”<sup>64</sup>

Undang-undang No. 01/1974 tentang perkawinan serta PP No. 09/1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan, menyatakan bahwa terjadinya perceraian adalah terhitung mulai saat pernyataan perceraian itu dinyatakan oleh suami dalam sidang Pengadilan Agama yang diadakan untuk menyaksikan perceraian itu. Dan dalam hal terjadinya gugatan perceraian, maka perceraian terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan Pengadilan Agama dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Putusan yang demikianlah yang diberikan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri (PN) dan pengukuhan ini bersifat administratif dan tidak bernilai yuridis. Namun apabila dimintakan banding oleh salah satu pihak atas putusan Pengadilan Agama itu,

<sup>64</sup> M Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 257-258



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum dan belum dapat dikukuhkan. Demikian juga jika dimintakan kasasi.<sup>65</sup>

#### **(4) Alasan yang Membolehkan Perceraian menurut Undang-undang dan Akibat dari Perceraian**

##### **1. Alasan yang Membolehkan Perceraian Menurut Undang-undang**

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian mengenai alasan perceraian itu dijelaskan lebih rinci oleh Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pada pasal 19 yang berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

---

<sup>65</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), cet. ke-5, h. 121

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

## 2. Akibat-akibat Perceraian

Dengan adanya putusan Perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, bukan berarti masalah perceraian ini selesai, akan tetapi masih ada akibat-akibat hukum lainnya yang ditimbulkan dari perceraian tersebut yaitu menyangkut masalah anak-anak, hubungan suami istri dan harta kekayaan mereka.

### a. Mengenai anak-anak

Dalam hal anak-anak yang masih menyusui kepada ibunya, apabila terjadi perceraian maka ibunya tetap berhak untuk menyusui dan memelihara anak itu, kemudian ayahnya juga tetap berkewajiban untuk memberi nafkah pemeliharaan dan pendidikan anaknya dari bayi hingga dewasa dan dapat mandiri.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah mengatur masalah ini yang dimuat dalam pasal 41 yaitu :

<sup>66</sup> Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. ke-1, h. 358

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

#### b. Mengenai Hubungan Suami Istri

Bagi pasangan yang telah bercerai, maka haram bagi mereka untuk melakukan hubungan suami istri, selain itu mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan istrinya tersebut. Mut'ah yang diberikan oleh mantan suami tersebut dapat berupa barang atau uang.

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur masalah ini secara mendalam yang dimuat dalam pasal 149 yaitu :

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhl.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang telah terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

#### c. Mengenai Harta Bersama

Islam tidak mengenal adanya percampuran antara harta kekayaan suami istri yang telah ada sebelum pernikahan. Harta kekayaan tersebut tetap menjadi milik masing-masing pihak selama mereka tidak menentukan lain. Apabila selama perkawinan mereka memperoleh harta, maka harta tersebut dinamakan harta syirkah yaitu harta yang menjadi milik bersama suami istri, oleh karena itu dalam Islam ada harta suami istri yang telah dicampur dan ada juga harta yang tidak dicampur.

Dalam hal harta kekayaan yang bercampur yang didapatkan selama perkawinan karena usaha bersama suami istri, menjadi milik bersama dari suami istri dan digunakan untuk kepentingan bersama. Kemudian apabila ikatan perkawinan tersebut putus baik karena perceraian maupun karena salah satu pihak meninggal dunia, maka harta bersama tersebut dibagi dua antara suami istri.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa penulis tentang alasan perceraian diluar pengadilan agama pada masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan:
  - a. Karena faktor Ekonomi, masyarakat menganggap bahwa biaya ke Pengadilan Agama sangat besar sehingga mereka enggan melakukan perceraian di pengadilan karena tidak terjangkau dengan keadaan ekonomi.
  - b. Karena faktor waktu, masyarakat yang melakukan perceraian di luar pengadilan Agama menganggap bahwa perceraian yang melalui proses pengadilan akan memakan waktu yang sangat lama.
  - c. Masyarakat menganggap perkara perceraian merupakan permasalahan keluarga, sehingga penyebab atau alasan perceraian harus ditutupi dan tidak ingin diketahui oleh masyarakat (lingkungan) sekitarnya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Karena akibat seringnya perceraian di luar pengadilan ini terjadi maka dianggap hal ini merupakan hal yang biasa (adat) yang sudah menjadi kebiasaan Masyarakat Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
  - e. Kurangnya kesadaran Masyarakat Desa Sukaramai terhadap Hukum yang berlaku. Mengenai masalah perceraian.
  - f. Wilayah kekuasaan Pengadilan Agama yang jauh dari Desa Sukaramai, sehingga menjadikan alasan masyarakat tidak mau bercerai di Pengadilan Agama.
2. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama akan berdampak terhadap banyak orang, bukan hanya pada istri atau suami yang melakukan perceraian akan tetapi bagi mereka yang mempunyai anak, anak-anak merekapun akan terkena dampaknya.

Dampak bagi suami dan istri yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan menyulitkan mereka akan menikah lagi. Karena tidak ada surat cerai yang disahkan oleh pengadilan, di samping itu istri yang diceraikan sulit menuntut nafkah iddah kepada suami yang menceraikannya. Sedangkan bagi anak tidak akan mendapatkan nafkah hidup yang jelas. Bahkan sama sekali tidak, mendapatkan haknya dari orang tua laki-laki (Bapak), karena tidak ada putusan hukum yang dapat memaksa.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kurang pahaman masyarakat terhadap yurisprudensi hukum Indonesia pada masyarakat Desa Sukaramai sehingga terjadi praktek perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi di bidang hukum khususnya pada Masyarakat Desa Sukaramai dan umumnya pada masyarakat yang masih mengalami keadaan tersebut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik et.al. 2002. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Abdurrahman. 1996. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademi Persindo CV
- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Al-Jaziri, Abdurrrahman. 1998. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hamdani, H.S. 2002. *Risalah Nikah: Hukum Pekawinan Islam*. Jakarta, Pustaka Amani
- Ayub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Departemen Agama RI, 1981. *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*. Jakarta: Proyek Binpapera.
- Djamali, Abdul. 1997. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Emzir. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Fuad Said, H. A. 1998. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum perkawinan Adat*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamid, Zahry. 1978. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.

Kementerian Agama RI, tt. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra

Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhdor, A. Zuhdi. 1999. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan.

Mursalim, Supardi. 2019. *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana.

Rafiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Rahman, A. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rahman, Bakri A dan A. Sukarja. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/B.W.* Jakarta: Hida Karya Agung.

Ramilyo, M. Idris. 2004. *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rasyid, Roihan A. 1994. *Hukum Acara PA*. Jakarta: Rajawali Press

Sabiq, Sayyid. tt. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.

Said, Fuad. 1994. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Somiati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Suma, Muhammad Amin. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sulaiman, Abi Daud. 1996. *Sunan Abi Daud*. Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiyah.

Thalib, Sayyuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press.

Taqiyyudin, tt. *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Dar al-Fikr.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1999. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Yunus, Mahmud. 1990. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT Hidayakarya Agung

\_\_\_\_\_. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI MASYARAKAT DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR) ”**, yang ditulis oleh:

Nama : **ANWAR FAUZAN AFIF**  
NIM : 11721102889  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

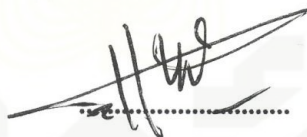
Hari / Tanggal : Kamis, 01 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ujian Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

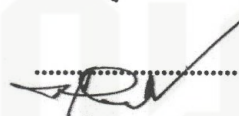
Pekanbaru, 05 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Heri Sunandar, M. CL**



Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, SI., MA**



Penguji I  
**Dr. H.Mohd. Yunus, M.Ag**



Penguji II  
**Dr. Zulikromi, LC, M.Sy**



Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN  
PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA"** (STUDI MASYARAKAT DESA  
SUKARAMAI, KEC. TAPUNG HULU, KAB. KAMPAR), ditulis oleh saudara :

Nama : Anwar Fauzan Afif

NIM : 11721102889

Program Studi : Hukum Keluarga

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 29 Desember 2020

Narasumber : Dr. H. Maghfirah, M.A

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
Narasumber

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

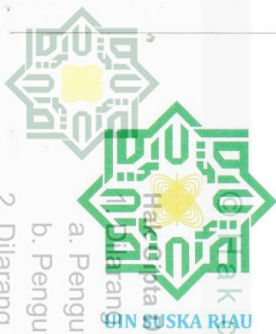
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indungi Undang-Undang

pta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3242/2021

Pekanbaru, 31 Maret 2021

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANWAR FAUZAN AFIF  
NIM : 11721102889  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Sukaramai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang  
berjudul : Tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian diluar Pengadilan Agama (studi  
Masyarakat Desa Sukaramai, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40418  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3242/2021 Tanggal 31 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

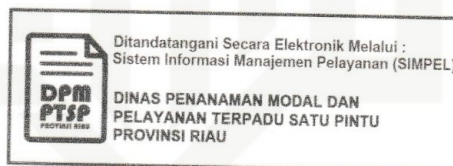
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>ANWAR FAUZAN AFIF</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11721102889   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI MASYARAKAT DESA SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SUKARAMAI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 1 April 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/306

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/40418 tanggal 1 April 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>ANWAR FAUZAN AFIF</b>  |
| 2. NIM              | : | 11721102889   |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | HUKUM KELUARGA  |
| 5. Jenjang          | : | SI  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN<br/>DILUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI DESA SUKARAMAI<br/>KECATAMAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR</b> |
| 8. Lokasi           | : | DESA SUKARAMAI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 5 April 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,

**ONNITA, SE**

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Kantor KUA Bangkinang Kota Kab. Kampar
3. Camat Tapung hulu di Senama Nenek
4. Dekan Fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
5. Yang Bersangkutan.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : ANWAR FAUZAN AFIF  
**NIM** : 11721102889  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA  
**JUDUL** : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN  
 DI LUAR PENGADILAN AGAMA (STUDI MASYARAKAT DESA  
 SUKARAMAI KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN  
 KAMPAR

**Pembimbing:** Dr. H. Maghfirah, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**ANWAR FAUZAN AFIF**, lahir di Sukaramai, Provinsi Riau pada tanggal 19 Februari 1997, merupakan anak ketiga dari 5 (lima) bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Zainal Abidin Sipayung Alm dan Ibu Rita Cabina. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 003 Sukaramai pada tahun 2002-2008, kemudian melanjutkan

pendidikan Madrasah Tsanawiyah di MTS Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang selama empat tahun dari tahun 2009-2013. Tamat dari Madrasah Tsanawiyah tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang selama tiga tahun dari tahun 2013-2016. Setelah selesai MA, penulis tidak melanjutkan pendidikan atau menganggur karena ada keinginan yang ingin penulis wujudkan pada saat itu, hingga di tahun berikutnya tepatnya di 2017 barulah penulis masuk perguruan tinggi.

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur UMPTK-IN. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini penulis aktif berorganisasi di Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 2018-2019. Penulis telah melakukan magang di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) pada Juli-Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli-Agustus 2020. Penulis melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap alasan perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, di bawah bimbingan Bapak Prof. Alaidin Koto. berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 01 Juli 2021, Alhamdulillah penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3,55 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat Cum Laude .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.